



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN HR. RASUNA SAID KAB. B2 LANTAI 10, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 50927412
www.bappenas.go.id

Nomor : T- 05547/ME.01.01/D.9/03/2023 Jakarta, 31 Maret 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pembukaan Masa Pemantauan
dan Pelaporan Aplikasi e-Monev 2023

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Renja K/L dan pelaporan data realisasinya sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan ini kami menginformasikan dan meminta kementerian/Lembaga untuk dapat melaksanakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L nya.

Pelaporan data realisasi tersebut dapat dilakukan pada Aplikasi e-Monev sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada :

1. Aplikasi e-Monev dapat diakses pada tautan : <http://e-monev.bappenas.go.id>;
2. User untuk mengakses aplikasi tersebut sama dengan *username* tahun sebelumnya. Jika terdapat perubahan struktur organisasi dan terdapat penambahan unit organisasi baru maka, kementerian/Lembaga dapat meminta user tersebut kepada pengelola Aplikasi e-Monev yakni Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. (021-50927412 dan laporan.pp39@bappenas.go.id);
3. Pelaporan Triwulan I Tahun 2023 akan dilakukan mulai tanggal **3 April 2023** s/d tanggal **5 Mei 2023**.
4. *Kick off* dan workshop Aplikasi e-Monev Tahun 2023 akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan April 2023, pemberitahuan lebih lanjut terkait hal ini akan kami sampaikan melalui Biro Perencanaan masing-masing kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya pelaporan ini dalam kerangka Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan khususnya Renja K/L dan RKP, kami mengharapkan agar pelaporan dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi
dan Pengendalian Pembangunan



Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si
NIP. 197407051999031002

Tembusan:

1. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Lampiran I

Nomor : T-05547/ME.01.01/D.9/03/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

Daftar Penerima Surat

Kepada Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama K/L:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
25. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
27. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Badan Intelijen Negara;
35. Badan Siber dan Sandi Negara;
36. Dewan Ketahanan Nasional;
37. Badan Pusat Statistik;
38. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
39. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
40. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
42. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
43. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Lembaga Ketahanan Nasional;
45. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Badan Narkotika Nasional;
47. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
49. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
50. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
51. Komisi Pemilihan Umum;

52. Mahkamah Konstitusi RI;
53. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
54. Badan Informasi Geospasial;
55. Badan Standarisasi Nasional;
56. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
57. Lembaga Administrasi Negara;
58. Arsip Nasional;
59. Badan Kepegawaian Negara;
60. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
61. Kementerian Perdagangan;
62. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
63. Komisi Pemberantasan Korupsi;
64. Dewan Perwakilan Daerah;
65. Komisi Yudisial;
66. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
67. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
68. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
69. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
70. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
71. Ombudsman Republik Indonesia;
72. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
73. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
74. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
75. Sekretariat Kabinet;
76. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
77. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
78. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
79. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
80. Badan Keamanan Laut;
81. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
82. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
83. Badan Pangan Nasional;
84. Otorita Ibu Kota Nusantara.